

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkaitan dengan otonomi daerah, desa menjadi basis dalam pembangunan nasional. Desa merupakan kesatuan warga yang mempunyai hak melakukan pengaturan dan pengurusan kepentingan warga dengan melaksanakan pemerintahan selaras dengan hak tradisional maupun hak asal-usul dan diberi pengakuan dari sistem pemerintahan NKRI menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014 (Republik, 2014). Upaya mengelola Keuangan Desa menjadi hak dan wewenang pemerintahan desa. Keuangan Desa dikelola dengan disiplin, akuntabel, transparan, serta keikutsertaan atau partisipatif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Pelaksanaan kewenangan Desa mengacu pada kewenangan maupun hak asal usulnya desa dan didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Damayanti et al., 2021). Anggaran menjadi hal yang penting untuk memperkirakan kinerja yang diharapkan oleh pemerintah (Darwanis, 2016). Pemerintah Desa menganggarkan segala bentuk sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan ke dalam APBDes dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa untuk satu tahun periode. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu rencana keuangan desa tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan diatur dengan peraturan desa (Umami & Widodo, 2021). Setiap desa akan diberikan kebebasan oleh Pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi harapan dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Demi memenuhi harapan dari masyarakat, pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan kinerja yang dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang baik.

Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat maka akan terkait dengan

besarnya dana yang dikelola pemerintah desa. Realokasi prioritas Dana Desa menjadi tuntutan agar pemerintah desa memperhatikan kinerja pengelolaan anggaran keuangan desa agar sesuai prioritas, ekonomis, efektif, dan efisien. Organisasi sektor publik seringkali dievaluasi sebagai sumber pemborosan, inefisiensi, korupsi, serta mendatangkan kerugian bagi institusinya (Mardiasmo, 2021). Oleh karena itu, anggaran menjadi hal yang penting untuk memperkirakan kinerja yang diharapkan oleh pemerintah (Darwanis, 2016). Keuangan Desa wajib dilakukan dengan pengelolaan yang mengacu pada asas akuntabel, transparan, disiplin anggaran, dan partisipatif (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018). Pada sektor publik, cakupan dari akuntabilitas ini terdiri dari akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, maupun akuntabilitas proses (Mahsun, 2006).

Penilaian kinerja pemerintah desa dapat dilihat melalui laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi patokan bagi pemerintah desa untuk mewujudkan *good governance*. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan banyak cara yaitu *Balance Scorecard* (BSC), *Performance Pyramid System* (PPS), *The Tableau De Bord* (TdB), *Productivity Measurement and Enhancement System* (ProMES), *Sink and Tuttle*, *Theory of Constrains* dan *Value for Money* (Na & Hipertensiva, n.d.). Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan secara efisien, ekonomis dan efektif. Aspek efisien, ekonomi dan efektif ini termuat di dalam pengukuran kinerja keuangan dengan metode *value for money*.

Menurut (Mardiasmo, 2021) *value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Penilaian kinerja keuangan sektor publik menggunakan *value for money* ini dapat tercapai secara maksimal apabila dalam penggunaan biaya masukan (*input*) paling kecil untuk mencapai suatu keluaran (*output*) yang optimal dalam pencapaian tujuan suatu organisasi atau sektor publik. Pengelolaan keuangan

menggunakan metode *value for money* ini cenderung berorientasi pada kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dalam program – program yang telah disusun. Tujuan pengukuran kinerja *value for money* yaitu, ekonomis dalam alokasi dan pengadaan sumber daya, efisien dalam menggunakan sumber daya, dan efektif sesuai dengan tujuan (Indrayani & Khairunnisa, 2019).

Berdasarkan fenomena hasil observasi di lapangan dalam penelitian, Kantor Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pusat, ingin mewujudkan desa yang mandiri dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun, pada kenyataannya masih banyak infrastruktur desa yang sudah dibangun, kurang memadai serta masih jauh dari harapan pemanfaatannya bagi warga sekitar. Hal ini disebabkan lambatnya respon dari masyarakat kepada pemerintah desa untuk menginformasikan apa yang kurang dari masing-masing wilayah mereka. Banyak dari masyarakat memberikan informasi terlambat diakibatkan kesadaran yang kurang dari masyarakat untuk ikut mengembangkan dan melestarikan wilayah mereka

Pada waktu penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Desa Kembang terkait rencana program dan pengelolaan pendapatan desa: terpenuhinya infrastruktur jalan, pertanian, peternakan, dan lain-lain meskipun sudah melibatkan Badan Musyawarah Desa (BMD) melalui MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), Kantor Desa Kembang sendiri setiap tahunnya melakukan pengukuran kinerja hanya saja berdasarkan penilaian hasil kinerja yang dilakukan saat rapat desa, dengan menggunakan indikator Pembangunan fisk sudah dilaksanakan. Pemerintah Desa Kembang selama ini belum pernah melakukan pengukuran kinerja yang sesuai dengan standart-standart salah satunya alat ukur kinerja akuntansi yaitu *value for money* untuk melihat sejauh mana pemanfaatan dana desa yang merupakan program Kemendes dalam pengalokasian sumber daya apakah sudah memenuhi indikator secara ekonomi, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan sasaran (Mardiasmo, 2021). Jadi, selama ini hasil kinerja pada Kantor Desa Kembang

hanya dilihat dari bukti, program-program dan bangunan fisik yang ada di Desa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Kantor Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso periode tahun 2017 sampai dengan 2021 menggunakan konsep *value for money* sebagai alat pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Permasalahan ini kami jadikan dasar penelitian untuk melihat sejauh mana pemanfaatan dana desa yang merupakan program Kemendes (Kementerian Desa) dalam pengalokasian sumber daya menggunakan konsep *value for money* sebagai alat pengukuran kinerja organisasi sektor publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dengan parameter ekonomis berdasarkan konsep *value for money* ?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dengan parameter efisien berdasarkan konsep *value for money* ?
3. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dengan parameter efektif berdasarkan konsep *value for money* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengukur dan menjelaskan kinerja keuangan Pemerintah Desa Kembang dengan menggunakan parameter ekonomis berdasarkan konsep *value for money*.
2. Untuk mengukur dan menjelaskan kinerja keuangan Pemerintah Desa Kembang dengan menggunakan parameter efisiensi berdasarkan konsep *value for money*.

3. Untuk mengukur dan menjelaskan kinerja keuangan Pemerintah Desa Kembang dengan menggunakan parameter efektivitas berdasarkan konsep *value for money*.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran serta masukan bagi pihak Kantor Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso mengenai anggaran dengan memperhatikan konsep *value for money* yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa membantu meningkatkan pemahaman ilmiah tentang pengukuran kinerja dengan konsep *value for money*.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan serta dijadikan acuan penelitian berikutnya bagi peneliti maupun pembaca lainnya terkait pengukuran kinerja.